



Hambatan dan peluang ?

Hambatannya tidak mustahil dari orang-orang Islam itu sendiri yang tidak tahu Islam. Kalau dari luar sudah jelas sekali. Tetapi tidak mustahil hambatan muncul dari dalam Islam itu sendiri. Muslim yang tidak tahu tentang Islam inilah yang kita khawatirkan. Sementara pendukungnya barangkali didukung oleh semua pihak dalam hal ini bukan hanya orpol tetapi termasuk ormas-ormas Islam.

Tentang gerakan ormas-ormas Islam ?

Kadar kemampuan sudah efektif, hemat saya merupakan suatu perwujudan "Apabila aku perintahkan sesuatu, lakukan yang kamu mampu." Dalam Syari'at dalam arti bentuk-bentuk pemerintahan dalam bentuk *Jinayah* belum berlaku akan tetapi minimal untuk hal-hal yang bersipat *mahdlah* sudah berlaku.

Bagaimana meyakinkan bahwa minoritas bisa terlindungi dengan adanya Syari'at Islam ini ?

Dalam Islam itu ada istilah *dzimmi*. *Dzimmi* itu adalah minoritas yang dilindungi selama mereka tidak mengganggu. Pada zaman Rasulullah kelompok Yahudi termasuk *dzimmi*. Dalam Al-Quran sendiri sudah jelas apabila ada orang non Islam di lingkungan orang Islam wajib dilindungi, kalau ada yang mengganggu ada hukuman tertentu bagi pelakunya.

Untuk penerapan yang paling baik harus seperti apa ?

Penerapan yang paling baik yaitu dari dua sisi tapi yang pasti yaitu segi struktural dulu sebagaimana pada zaman Rosul, kemudian nanti ada pemasyarakatan bagaimana mensosialisasikan gerakan bagi para da'i yang bergerak di bawah, jadi ada pembagian tugas.
Dian/TR

DRS. AYAT DIMYATI, M.Ag

PD. I Fak. Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung



Untuk Kaaffah Masih Berat

Komentar Bapak tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia ?

Sebenarnya konsep Syari'at Islam itu sendiri harus lebih jelas dahulu. Sementara ini ada yang mendekati pelaksanaan Islam dari aspek politik, aspek struktural dan kultural.

Demikian juga perlu jelas dulu kondisi pembinaan yang ada. Karena diukur dari bagaimana Rasul melaksanakan Syari'at, yaitu

melalui manajemen Tuhan artinya Tuhan Berfirman, Rasul melaksanakan. Ada reaksi dari bawah, Tuhan juga memberikan solusi, turun ayat-ayat Al-Quran sehingga mudah sekali untuk dilaksanakan. Melihat dari pengakuan orang kafir sendiri mengenai pertanyaan mengapa Al-Quran itu turun tidak sekaligus tetapi berproses. Orang-orang kafir itu menjadi kewalahan mengantisipasi



KAJIAN UTAMA

dakwah Nabi Muhammad ketika itu.

Pandangan umat Islam mengenai agama itu sendiri berbeda-beda. Satu pihak ada yang menggelindingkan Islam secara global, makro hingga agama Islam itu relatif inklusif dalam pandangan mereka. Di lain pihak ada yang mempelajari Islamnya itu dari *far'iyah* dari pendapat-pendapat yang eksklusif.

Mempertemukan mereka bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sementara ini, yang sangat dominan adalah pihak dari kaum *furu'iyah*. Karena yang parsial itu sudah lama terbangun.

Belum lagi berkaitan dengan kondisi umat Islam yang penguasaan wilayah publiknya sangat rendah. Sementara ini ada landasan dalam surat Al-Maidah ayat 48. Umat Islam dalam studi agama dalam hal ini Al-Qur'an dan Al-Sunah masih *syir'atan*. *Syir'atan* ini adalah dalam format butiran-butiran norma hukum yang terkait langsung dengan perbuatan ilmu kalam. Artinya yang di pelajari umat Islam saat ini adalah periode madaniah. Bukan *minhaj*.

Yang dimaksud *minhaj* ini adalah jalan yang lurus dan jelas yang bisa mengantarkan kepada tujuan dari keberagaman umat Islam. Rasulullah berdasarkan *minhaj* Qur'ani, sementara kita tidak. Rasulullah berangkat dari periode Makiyah dengan karakteristiknya, baru kemudian Madaniyah. Sementara kita dari Madaniyah, sehingga untuk masuk kepada Islam yang *kaffah* dan komprehensif itu sangat berat. Islam komprehensif itulah tatanan publik untuk membangun kejemaahan dan nanti kepemimpinan (*Imamah*). Ini berat di dunia Islam Sunni, khususnya paham keagamaannya seperti Muhammadiyah, Persis dan Nahdatul Ulama.

Tentang gerakan ormas-ormas Islam?

Gerakan Ormas yang ada, saya masih melihat dari segi efisiensi dan efektifitas, kita

belum memberikan solusi bentuk lain.

Umpamanya adalah kiprah Muhammadiyah, Persis dan Nahdatul Ulama yang sekarang. Muhammadiyah diklaim sebagai salah satu aset terdepan dalam modernisasi ternyata itu masih banyak kendala untuk bisa masuk dalam Islam yang inklusif, Islam yang global, Islam yang universal.

Kira-kira akan terwujud untuk Indonesia?

Syari'at Islam dalam arti *kaffah* masih berat. Jangankan di Indonesia, di dunia pun masih berat. Hambatannya dari segi keilmuan Islam, itu sudah pada tatanan parsial. Islam itu dipahami melalui Ulumul Qur'an, Usul Fiqih, Ilmu Kalam. Orang mengukur keislaman dari segi parsial, tidak kemusliman yang intergratif. Jadi "*Yauma akmal*" dan "*Lakum dinakum*" atau kesempurnaan agama itu tidak mungkin bisa ditangkap dan diukur oleh hanya satu bidang ilmu.

Sementara ini Fiqih dipakai untuk menilai orang yang pendekatan keislamannya Tasawuf, Tasawuf dipakai untuk mengukur orang yang keislamannya dari Fiqih. Itu tidak akan ketemu, itulah yang dimaksud parsial.

Kemudian juga dari lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti IAIN, keilmuannya masih pola parsialitas. Karena pola keilmuan sekarang itu dibangun atas dasar silogisme kategori ilmu baik itu Ulumul Qur'an, Ulumul Hadits, terutama Usul Fiqih itu dibangun atas dasar Tesa, Antitesa dan Sintesa.

Sedangkan kita perlu memakai Islam sebagai premis mayor kemudian premis minor dan konklusi. Maka, kembalikan lagi premis mayor mengapa demikian, dari segi keilmuan. Karena itu harus bisa dibalik dari segi keilmuan. Kembalikan kepada keislaman kita. Karena keilmuan kita yang masih parsial itu belum bisa menjawab persoalan seharusnya kita bersama-sama membela Islam ini, kembali lagi kepada individu itu. Itu beratnya terutama dalam bidang perpolitikan.



KAJIAN UTAMA

Peluang dari UUD 45 dan Undang-undang Otda ?

Undang Undang Dasar 1945 memang menjamin, walaupun hanya nuansa-nuansa. Tat kala dalam pasal 29 itu mau diamandemen itu ternyata belum bisa. Padahal kalau dilihat anggota Dewan sekian banyaknya itu adalah ummat Islam paling berapa persen yang mengajukan untuk dirubah, jadi kembali kepada Piagam Jakarta itu merupakan cerminan keagamaan Islam di Indonesia. Otda mengacu kepada Undang Undang Dasar. Memang, Cianjur akan menggelindingkan Syari'at Islam, kemudian Garut sudah memunculkan Dewan Imamah. Namun, ketika konsep hukum pidana Islam dirumuskan, ternyata mentoknya adalah Undang Undang itu yang belum mengayomi.

Untuk Cianjur belum bisa dalam hukum pidana, hanya bagaimana membangun ukhuwah. Artinya masjid agung yang dipegang oleh satu ormas saja, sekarang dikelola secara bersama-sama. Jadi dimensi ukhuwah saja. Sementara aksi politik gerakan penerapan UU pidana belum bisa.

Bagaimana meyakinkan bahwa minoritas bisa terlindungi dengan adanya Syari'at Islam ini ?

Minoritas bisa terjamin dan terlindungi oleh mayoritas kalau memang Syari'at Islam itu ditegakkan secara konsepsi maupun ijtihad para ulama. Secara konsepsi bisa menjamin HAM adalah Syari'at Islam dengan surat Al-Alaq lima ayat pertama. "*Iqro bismi rabbika ladzi kholaq*" itu Rububiyah "*Kholaq insana min 'alaq*" itu Insaniyah "*Alladzi 'alama bil qalam 'alamal insana malam ya'lam*" itu Peradaban.

Peradaban Islam tegak di atas dasar nilai kemanusiaan, nilai kemanusiaan itu dapat dijamin bila tegak di atas dasar Rububiyah (ketuhanan). Jadi secara timbal balik, tidak bisa yang satu tanpa yang lain. Ketiga nilai

dalam surat Al-'Alaq itu merupakan acuan dari semua aktivitas ajaran agama yang dilakukan umat bagi ajaran-ajaran agama yang lain/umat yang lain seperti sholat, zakat, shaum aktivitas duniawi mengacu pada ketiganya itu.

HAM yang digelindingkan Amerika tidak mengacu pada nilai Ketuhanan, demikian juga dengan demokrasi. Kelebihan umat Islam ada pada nilai ketuhanan. Dari segi ajaran, dari segi interpretasi tentang ajaran itu jelas dalam pelaksanaan Hukum qishash itu tidak dibedakan antara mu'min membunuh kafir, kafir membunuh mu'min. Karena itu sama-sama jiwa. Ukurannya tetap keadilan sebagai acuan utama kehidupan bersama

Untuk penerapan yang paling baik harus seperti apa ?

Secara struktural mereka yang masuk ke dalam wilayah politik tidak paham tentang politik Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika mereka masuk ke wilayah itu bisa dilihat siapa yang berorientasi keumatan. Kalau UUD diuji di lapangan, bukanlah negara kita berkedauletan rakyat karena bukan rakyat yang berdaulat tetapi pengusaha, jadi polanya adalah kebijakan penguasa. Jadi pengusaha itu yang didekati bukan rakyat yang didekati. Sedangkan dalam kepemimpinan Islam baik itu kekhalifahan ataupun kerajaan dalam bentuk bagaimanapun juga, kepemimpinan dalam Islam adalah keumatan.

Umpanya Nabi untuk keumatan tidak ada jaminan material bagi dirinya dan bagi keluarganya demikian pula Abu Bakar, Umar itu terlalu ideal dalam tatanan raja-raja saja. Keumatannya sangat kuat. Ini bukan berarti bahwa pengusaha itu harus dijauhi, tetapi bagaimana secara seimbang (*balance*) pengusaha didekati untuk kemakmuran rakyat. Idealnya seperti itu. Dian/TR.